

KESIAPAN KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2024

1

Sidiq Budi Sejati

Abstrak

Rakyat Indonesia tidak lama lagi akan menggelar pesta demokrasi besar. Berbagai persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sudah dimulai. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024 tersebut. Mengambil pelajaran dari Pemilu sebelumnya, Presiden menekankan agar penyelenggara Pemilu dapat memastikan kejelasan koridor hukum di setiap tahapan, menyempurnakan peraturan teknis, meningkatkan kapasitas SDM pelaksana, memperkuat pendidikan politik bagi seluruh peserta dan pemilih, serta mengajak kampanye yang dapat menyehatkan proses demokrasi di Pemilu Serentak 2024. Diperlukan pengawasan dan evaluasi yang optimal terhadap kinerja penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapannya. Tulisan ini membahas sampai di mana kesiapan dan upaya apa yang harus dilakukan oleh KPU untuk memenuhi arahan Presiden Joko Widodo. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi II DPR RI dapat terus mendorong pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan koordinasi terkait kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, baik itu kesiapan teknis maupun ketersediaan anggaran.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 sudah semakin dekat. Rakyat Indonesia akan menggelar kembali pesta demokrasi yang terdiri atas Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Segala bentuk persiapan oleh penyelenggara Pemilu sudah dimulai tahap demi tahap secara hati-hati dengan memperhatikan

banyak hal guna meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil yang sangat memungkinkan menjadi masalah ke depan. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2019 yang tercatat dalam lembaran sejarah Indonesia merupakan pemilu terburuk dikarenakan menimbulkan banyaknya korban jiwa. Hal ini jelas menunjukkan adanya permasalahan di dalamnya. Oleh



karena itu dilakukan evaluasi agar permasalahan yang muncul pada Pemilu 2019 tidak terulang kembali pada tahun 2024. Dalam hal ini arahan diberikan pada KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu.

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada KPU dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Konsolidasi ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus KPU se-Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu 2024. Presiden Joko Widodo meminta, agar pada sisa waktu yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan Pemilu, memperbaiki segala kelemahan, dan kekurangan yang ada serta membangun inovasi agar Pemilu semakin berkualitas serta hasilnya mendapat dukungan dari masyarakat luas (Republika.co.id, 2 Desember 2022). Tulisan ini mengkaji sejauh mana kesiapan dan upaya apa yang harus KPU lakukan untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Arahan Presiden terkait Pemilu

Pengalaman pelaksanaan Pemilu serentak sebelumnya, seharusnya dapat menjadi contoh pembelajaran untuk perbaikan baik itu oleh penyelenggara Pemilu ataupun oleh masyarakat Indonesia itu sendiri sebagai pemilih. Fokus arahan Presiden Joko Widodo adalah: *pertama*, agar KPU dapat memastikan segala tahapan kegiatan harus memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang akan

muncul. *Kedua*, meminta KPU agar memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat, efisien dan transparan. Karena hal-hal teknis dan kecil menurut Presiden dapat menjadi politis dan berpotensi menimbulkan permasalahan di lapangan. Pengadaan logistik perlu dilakukan secara efisien dan transparan sehingga semuanya terbuka tidak ada kecurigaan terhadap tahap ini. *Ketiga*, KPU perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan SDM di setiap tingkatan sehingga mampu bekerja dengan baik.

Keempat, KPU harus bekerja dengan cermat, efektif dan efisien dalam mengelola prioritas penggunaan anggaran karena Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian. *Kelima*, KPU perlu memperkuat pendidikan politik bagi para peserta pemilu maupun masyarakat. KPU mengajak peserta untuk melakukan Pemilu yang damai, jujur, berintegritas, tidak menyebar fitnah, tidak menyebar ujaran kebencian dan melakukan politik uang yang dapat mencederai demokrasi. Presiden juga mengajak melakukan kampanye berkualitas yang dapat menyehatkan demokrasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan dan bukan politik adu domba (Viva.co.id, 2 Desember 2022).

Merespon arahan dari Presiden, KPU menyatakan percaya diri dan sanggup melaksanakan Pemilu Serentak 2024 meskipun infrastruktur di berbagai daerah belum sempurna dan membuat pelaksanaannya tidak mudah untuk dilakukan. KPU menilai sudah memiliki pengalaman

menggelar pemilu di daerah terpencil dan berpengalaman melaksanakan pemilu pada saat terjadi bencana. Pengalaman-pengalaman tersebut akan dijadikan bahan oleh KPU untuk menyusun rencana mitigasi. Selain itu KPU juga akan segera menyiapkan media atau forum yang tepat untuk mengakomodir usulan presiden terkait kampanye adu gagasan (Cnnindonesia.com, 3 Desember 2022). KPU mengklaim bahwa seluruh personel KPU dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota dalam kondisi sehat dan siap untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024, hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan jalan sehat KPU di Monas sekaligus menutup acara konsolidasi nasional (Investor.id, 3 Desember 2022). Terkait pengendalian informasi hoaks, KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sepakat untuk berkolaborasi dengan para *stakeholders*. Kesepakatan tersebut terjalin dalam acara Indonesia Fact-Checking Summit 2022 yang menyimpulkan tantangan di Pemilu Serentak 2024 khususnya media sosial tidaklah berbeda dari sebelumnya di mana informasi hoaks masih menasar kepada penyelenggara Pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih (Bawaslu.go.id, 30 November 2022). Kepercayaan diri masih belum cukup mampu untuk dapat membuktikan kesiapan yang sesungguhnya untuk mengantisipasi permasalahan seperti yang terjadi pada Pemilu di tahun 2019. Kesiapan KPU memerlukan langkah yang lebih konkret, menyeluruh, dan tepat sasaran terutama pada tahap perencanaan untuk mencegah permasalahan yang mungkin dapat muncul pada saat pelaksanaan di lapangan.

Kesiapan dan Upaya KPU

Apabila melihat arahan dari Presiden Joko Widodo supaya pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan sukses atau lebih baik maka ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Kesiapan teknis; (2) Kesiapan SDM pelaksana, dan (3) Kedewasaan berpolitik peserta dan pemilih dalam merespon pesta demokrasi ini. Faktor-faktor di atas memang masih menjadi kelemahan dan masih terus diupayakan untuk diperbaiki di setiap rezim penyelenggara Pemilu. Dari kesiapan teknis dalam koridor hukum seperti ketersediaan peraturan teknis di setiap tahapan sudah lebih baik. Justru permasalahan yang sering muncul adalah akibat tahap perencanaan kegiatan yang kurang sempurna, sehingga menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini terlihat ketika proses distribusi logistik, KPU harus benar-benar dapat melakukan pemetaan khususnya ke daerah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan). KPU harus bisa menetapkan dan menjalankan mekanisme, skema, dan *timeline* pendistribusian logistik Pemilu ke daerah secara cermat dan tepat. Koordinasi KPU dengan lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan dan aparat keamanan juga harus diperkuat. Bahkan perlu juga dipersiapkan rencana alternatif jika tiba-tiba terjadi kendala operasional seperti keterlambatan atau *delay*, pembatalan, dan bencana alam.

Dari sisi kesiapan SDM petugas penyelenggara juga perlu diperkuat dengan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) yang intensif sesuai dengan tingkatan serta tugas dan

fungsinya masing-masing. Bimtek dilakukan dengan tidak terburu-buru atau hanya sekedar normatif, tetapi juga harus menjamin pemahaman dari setiap petugas terkait materi bimtek terutama pemahaman petugas *ad hoc* yang berada diposisi hilir. KPU juga perlu merumuskan kurikulum bimtek yang lebih mudah dimengerti serta prosedur yang lebih sederhana dari sebelumnya. Selain bimtek, KPU juga perlu melakukan simulasi penyelenggaraan di berbagai tempat dengan berbagai macam kondisi dan situasi seperti tingkat pemahaman petugas, kerawanan konflik, dan kondisi geografis suatu daerah guna memberikan waktu toleransi dalam menyelesaikan seluruh tahapan yang dibutuhkan pada masing-masing daerah.

Selain dibekali pengetahuan, petugas *ad hoc* juga perlu diberikan motivasi dan apresiasi atas kinerjanya dengan memberikan honorarium yang lebih layak serta pengaturan jaminan kesehatan yang lebih jelas, mengingat di Pemilu 2019 banyak jatuh korban jiwa akibat kelelahan karena beban kerja yang cukup berat. Tahapan pemungutan dan perhitungan suara yang masih manual seperti saat ini memang melelahkan, tetapi kita harus tetap optimis kedepannya Indonesia dapat menyelenggarakan Pemilu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti *e-voting*.

Selanjutnya adalah kedewasaan dalam berpolitik baik itu oleh peserta pemilu ataupun pemilih. Hal ini sangat penting untuk segera diwujudkan karena dampak dari lemahnya sikap ini adalah terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa. Lemahnya

edukasi terkait pendewasaan berpolitik dapat menyebabkan ketidakpahaman sehingga dapat menimbulkan peristiwa yang mengganggu ketertiban umum serta merusak kerukunan dan toleransi antar umat beragama seperti yang terjadi di Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019. Kedewasaan politik memiliki arti sebagai kematangan individu, kelompok, ataupun lembaga dalam bersikap maupun berperilaku terkait kegiatan politik, fakta politik, kekuasaan, pemerintahan dan negara (Gunawan dalam Wahyu dan Abdul). Sedangkan kedewasaan politik dapat dilihat dari aktivitas dalam berpolitik di mana dalam kegiatannya tidak menggunakan fitnah, ujaran kebencian, dan perilaku yang dapat memecah belah bangsa di dalamnya (Panggabean dalam Wahyu dan Abdul). Pendewasaan berpolitik dapat dibentuk dengan meningkatkan literasi politik, sedangkan literasi politik dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi politik yang benar. Sosialisasi politik dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat-tempat ibadah, tempat kerja, kelompok sosial dan juga oleh media (Wasburn dan Covert dalam Khoiruddin, 2018). Oleh karena itu upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang dewasa dalam berpolitik bukan hanya kewajiban pemerintah semata atau partai politik. Hal ini harus menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama seluruh elemen agar terus dapat memberikan edukasi yang baik dan benar yang sepatutnya dapat dimulai dari diri sendiri serta lingkungan terdekatnya.

Penutup

Perlu disepakati Bersama, Pemilu Serentak 2024 harus berjalan lebih baik, tertib dan aman daripada sebelumnya karena masih cukup waktu untuk memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan yang ada. KPU boleh merasa percaya diri namun arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan poin-poin penting yang harus lebih diperhatikan, seperti kepastian hukum, kesiapan teknis, penguatan SDM pelaksana serta pendewasaan berpolitik juga merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan. Persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga menjelang pelaksanaan sampai dengan pesta demokrasi selesai diselenggarakan. Kolaborasi antar lembaga juga perlu ditingkatkan untuk menjamin suksepsi Pemilu Serentak 2024.

Diperlukan pengawasan dan evaluasi yang optimal terhadap kinerja penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan seluruh tahapan penyelenggaraan. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran Komisi II DPR RI dapat terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu khususnya kepada KPU dalam mempersiapkan tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, baik dari sisi teknis maupun ketersediaan anggaran.

Referensi

Agusta, Rama. 2022. "Tangkal Hoaks di Medsos, Bawaslu Kolaborasi dengan Banyak Pihak", 30 November 2022, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tangkal-hoaks-di-medsos-bawaslu-kolaborasi-dengan-banyak-pihak-0>, diakses

7 Desember 2022.

Anwar, Sadat. 2022. "5 Arahan Jokowi ke KPU Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024", 2 Desember 2022, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1550756-5-arahan-jokowi-ke-kpu-jelang-pelaksanaan-pemilu-2024?page=2>, diakses 6 Desember 2022.

Bashori, Khoiruddin. 2018. "Pendidikan Politik di Era Disrupsi". Sukma: *Jurnal Pendidikan*, Vol. 2 Issue 2, Jul-Dec 2018, pp. 287-310, ISSN: 2548-5105 (p), 2597-9590 (e).

Christiyaningsih. 2022. "Presiden Tekankan Lima Hal terkait Pemilu Serentak 2024", 2 Desember 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rm99fg459/presiden-tekankan-lima-hal-terkait-pemilu-serentak-2024>, diakses 6 Desember 2022.

Fajrian. 2022. "KPU Soal Pemilu 2024 Tak Mudah: Kami Punya Pengalaman", 3 Desember 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221203044741-32-882240/kpu-soal-pemilu-2024-tak-mudah-kami-punya-pengalaman>, diakses 6 Desember 2022.

Lestari, Pudja dan Haniel Rivelino, "Ketua KPU Hasyim Asy'ari: Personel KPU Sehat dan Siap Gelar Pemilu 2024" 3 Desember 2022, <https://investor.id/nasional/315122/ketua-kpu-hasyim-asy39ari-personel-kpu-sehat-dan-siap-gelar-pemilu-2024>, diakses 6 Desember 2022.

Setiawan, Wahyu dan Abdul Muhid. 2021. "Pengaruh Media terhadap Pendewasaan Politik Umat Islam: Litertaur Review". *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, Vol. 5, No. 1 Juni 2021 pp. 73-85, P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179.



Sidiq Budi Sejati
sidiq.sejati@dpr.go.id

Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP., lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.